

BABIV
ANALISIS KONSEP BERNEGARA DAN PARADIGMA PEMIKIRAN
ABDURRAHMAN WAHID

A. Konsep Bernegara Menurut Abdurrahman Wahid Di Indonesia

1. Ideologi Negara

Abdurrahman Wahid merupakan intelektual muslim Indonesia yang populer dengan gagasan-gagasan kontraversialnya. Gagasan yang dilontarkannya senantiasa mengandung perdebatan yang hangat dan menjadi polemik yang berlarut-larut, terutama berkaitan dengan gagasan tentang “Ideologi Pancasila”. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang ideologi muncul secara kontraversial menjelang pengazastunggalan Pancasila. Di mana ideologi diletakkan pada neraca penilaian yang sangat pragmatis dan tidak terlalu diagung-agungkan sebagai “benda suci” meskipun tetap dipandanginya sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penggunaan ideologi untuk kepentingan yang lebih sempit dari fungsi tersebut, misalnya sebagai landasan legitimasi bagi otoritarianisme suatu rezim terhadap masyarakat, hanya akan cenderung membuat kehancuran ideologi tersebut⁸⁰.

Pragmatisme inilah yang melandasi pola pemikiran Abdurrahman Wahid bahwa “pemerintahan negara ditilik dan dinilai dari fungsionalisasinya, bukan dari norma formal dari eksistensinya”. Lebih

⁸⁰ 1A. Ghaffar Karim, *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Raja Grafindo, 1999), hal. 99.

jauh, dalam fungsinya sebagai faktor pemersatu bangsa maka ideologi harus mampu menjadi perisai dari serangan terhadap kesatuan serta menjadi penahan bagi tarikan ke arah perpecahan bangsa⁸¹. Karena fungsi yang demikian, seyogyanya ideologi harus merupakan hasil sintesa dari beberapa pemikiran yang beragam, yang eksistensinya sudah dipastikan dalam heterogenitas kehidupan masyarakat Indonesia.⁸²

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, Pancasila yaitu sebuah kesepakatan politik yang memberi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kehidupan nasional yang sehat di dalam sebuah Negara kesatuan. Namun, ia masih melihat adanya sejumlah ancaman terhadap konsepsi Pancasila sebagaimana yang diharapkannya. Keprihatinan Abdurrahman Wahid ini tentu saja mewakili sebuah citranya sebagai seorang nasionalis dari pada sebagai seorang pemikir Islam, walaupun tidak bisa disangkal lagi, bahwa Abdurrahman Wahid pada hakikatnya yaitu mewakili generasi baru pemikir Islam revolusioner Indonesia.

Menurut Greg Bartholomew, bahwa pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid, sebagaimana halnya Djohan Efendy, Nurcholish Madjid, dan almarhum Ahmad Wahid, sudah cukup utuh dan lengkap untuk dianggap sebagai sebuah mazhab sebagaimana semestinya. Bartholomew dengan mengutip pendapat Fazlur Rahman, menyebutnya sebagai *neo-modernist*.⁸³

⁸¹ *ibid.* hlm. 100

⁸² Douglas E. Remage, *Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya dalam Era Paksa Asas Tunggal*, dalam Ellyasa KH. Darwis (ed.), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, cet. I (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994), hal. 103-104.

⁸³ Greg Bartholomew, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia alih bahasa Nanang Tahqiq*, (Jakarta, Paramadina, 1999), hal. 171.

Greg Bartho menilai bahwa mazhab ini telah berperan sangat penting dalam merebut sebuah posisi yang baru dalam pemikiran Islam Indonesia. Salah satu ciri yang memadai pemikiran *neo-modernis* ini yaitu “komitmen pada pluralisme dan nilai-nilai inti demokrasi”. Selain itu, nilai-nilai pluralistik ini telah dirajut ke dalam struktur Iman (Islam) sebagai suatu nilai Islam itu sendiri. Karena alasan-alasan inilah Bartho berpendapat bahwa Abdurrahman Wahid dan para *neo-modernis* lainnya berada dalam barisan pembaharuan negara demokrasi

Posisi Abdurrahman Wahid yang menempatkan Pancasila dasar Negara dan sebagai prasyarat demokratisasi dan pembangunan semangat ke-Islaman yang sehat nampaknya harus dilihat dari perspektif *neo-modernis* ini. Suatu pandangan yang secara jelas berbeda misalnya, dikotomi Islam versus Pancasila di masa konstituante. Integrasi antara kemajemukan, demokrasi, Islam dan nasionalisme. Hal inilah yang secara intelektual dan politis telah melatar belakangi upaya perubahan keikutsertaan Islam di dalam wacana politik dan ideologi Pancasila selama sepuluh tahun terakhir.

Sering kali Abdurrahman Wahid menekankan keyakinan nasionalis NU dengan menegaskan kesetiaan NU pada Pancasila sebagai dasar negara⁸⁴. Misalnya, dalam sebuah sambutan di depan warga NU pada tahun 1992, ia mengingatkan bahwa penerimaan NU dan bahkan penganutnya pada Pancasila bisa diterima karena beberapa alasan; ia menjelaskan bahwa pada tahun 1945 Soekarno meminta nasehat para

⁸⁴ M. Mashur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, cet. I (Yogyakarta: al-Amin, 1996), hal. 97.

pemimpin NU, termasuk ayahnya yang membantu Soekarno merumuskan atau menulis lima asas Pancasila. Tidak disangsikan lagi bahwa Abdurrahman Wahid memiliki ikatan sentimental pada Pancasila dari rasa bangganya, karena ayahnya telah membantu Soekarno membuat dasar negara. Lebih dari itu, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa tidak adakontradiksi antara Islam dan nasionalisme bahwa Islam bisa berkembang secara spiritual dalam sebuah negara nasional yang tidak secara formal berdasarkan Islam.⁸⁵Selanjutnya Abdurrahman Wahid mencoba menempatkan Pancasila dalam dua predisposisi ini. Ia berpendapat bahwa berbagai ideology universal yang masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai hal seperti kemasyarakatan, perekonomian, dan lain-lain, telah masuk ke Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan. Oleh karenanya, Abdurrahman Wahid membagi ideologi itu dalam dua katagori umum, yakni ideologi *sekular* dan ideologi *teokratis*. Ideologi⁸⁵sekular menghendaki agar agama tidak turut menjadi faktor penentu dalam kehidupan kenegaraan, sehingga negara harus netral dalam soal agama, dan agama dipandang semata-mata sebagai urusan pribadi setiap individu. Nasionalisme, sosialisme dan kapitalisme termasuk dalam kelompok ideologi sekular ini. Sedangkan ideologi dalam katagori kedua (ideologi teokratis) menginginkan agar agama (dalam kasus Indonesia yaitu agama Islam) menjadi kekuatan penentu utama dalam kehidupan bernegara, sehingga terbentuk negara teokratis. Jadi negara turut

⁸⁵ A. Gaffar Karim, *Metamorfosis*, hlm. 101.

bertanggungjawab atas terlaksananya syari'at agama dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan individu.

Dalam keyakinan Abdurrahman Wahid, bahwa pemerintahan yang berideologi Pancasila, termasuk “negara damai” yang harus dipertahankan. Karena syari'ah dalam bentuk hukum agama (fiqh) atau etika masyarakat masih dilakukan oleh kaum muslimin di dalamnya, sekalipun hal itu tidak diikuti dengan upaya legislasi dalam bentuk undang-undang negara. Bila etika masyarakat Islam dijalankan, tidak ada alasan lain bagi umat Islam selain mempertahankan Pancasila sebagai kewajiban agama.⁸⁶

Lebih lanjut, Abdurrahman Wahid menolak dengan tegas tentang fungsi suplementer agama dalam negara maupun fungsi alternatif agama sebagai ideologi tunggal negara. Dipilihnya agama sebagai suplemen dalam kehidupan bernegara akan berakibat pada kecilnya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan mendukung tegaknya kedaulatan hukum serta kecilnya ruang gerak bagi kebebasan berbicara dan berpendapat. Dalam posisinya yang bersifat suplementer, hubungan agama dan negara akan bersifat manipulatif, yaitu sekedar menyediakan simbol-simbol agama sebagai legitimasi bagi kekuasaan⁸⁷. Namun Abdurrahman Wahid juga menolak dijadikannya agama sebagai ideologi alternatif bagi bangsa.

Dalam sebuah negara pluralistik, menjadikan Islam atau agama apapun

⁸⁶ Dedy Malik Djamaluddin, & Idy Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat*, (Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998), hal.170.

⁸⁷ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 129.

sebagai ideologi negara hanya akan memicu disintegrasi yang berbasis pada sektarianisme. Negara seperti Indonesia tidak mungkin memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh semua warga negara, yang berasal dari agama dan pandangan hidup yang berlainan ⁸⁸

Akan tetapi, penerimaan atas Pancasila sebagai asas itu juga dilahirkan secara keagamaan, dalam mendudukan agama dan Pancasila pada tempat masing-masing, tanpa harus dipertentangkan, ungkap Abdurrahman Wahid. Baginya, antara Pancasila sebagai landasan ideologi-konstitusional dan akidah Islam menurut *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* sebagai landasan keimanan, tidak dapat dipertentangkan, karena pada hakekatnya orang berasas Pancasila karena kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian telah mengambil salah satu dasar dalam Pancasila, sedangkan berakidah yaitu tindakan mengkonkritkan Pancasila dalam salah satu bidang kehidupan beragama hubungan yang saling mendukung antara akidah dan asas, jadi antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi, yaitu suatu hubungan saling mengisi yang kreatif, yang akan menyuburkan kedua-duanya.

Menurut Abdurrahman Wahid, agama dan Pancasila tidak boleh diidentikkan secara menyeluruh, karena fungsi masing-masing saling berbeda. Pancasila berfungsi sebagai landasan hidup berbangsa dan

⁸⁸ Ibid. hal.131.

bernegara⁸⁹. Dengan kata lain, menjadi kerangka kemasyarakatan kita sebagai bangsa. Dalam kondisi demikian, Pancasila haruslah mewadai aspirasi agama-agama (termasuk Islam) dan menopang kedudukannya secara fungsional. Sedangkan agama (termasuk Islam) merupakan landasan keimanan warga masyarakat dan menjadi unsur motivatif yang memberikan warna spiritual kepada kegiatan mereka.⁹⁰

Abdurrahman Wahid juga melihat Pancasila sebagai “aturan permainan” yang menghubungkan semua agama dan paham dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kalau misalnya Pancasila hanya berfungsi membesarkan satu agama saja, misalnya hanya Islam, maka ia akan berhenti sebagai “aturan permainan” yang telah disepakati bersama. Dalam kaitannya dengan klaim setiap agama bahwa kebenaran mutlak ada pada dirinya, Pancasila haruslah memberikan rumusan interpretatif yang memenuhi kepentingan semua pihak, dan bukannya satu pihak saja. Dalam konteks ini, dapat dirumuskan bahwa Pancasila memperlakukan semua agama sebagai sama di muka hukum dan dalam pergaulan masyarakat.

Kendati demikian, pada tahun 1930-an Nastir, Agus Salim, Tanmalaka, Bung Karno, dan Hatta, Syahrir, semuanya terlibat dalam perdebatan yang sangat sengit tentang bentuk negara atau dasar negara Indonesia jika merdeka nanti. Sampai dua belas tahunan perdebatan antara ideologi sekuler dan teokratis ini berlangsung. Di mana dua-duanya sama

⁸⁹ Andree Fealler, *NU Vis a Vis Negara*, alih bahasa Lesmana, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hal. 244.

⁹⁰ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, cet. (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 197.

ingin diterapkan di Indonesia. Akan tetapi perdebatan itu akhirnya terbentur pada kenyataan bahwa tidak satu pun dari mereka yang dapat mengharapakan kemenangan atas yang lainnya. Sekulerisme sudah pasti tidak akan dapat diterima oleh bangsa Indonesia yang religius dengan keyakinan bahwa agama bagaimanapun tetap berperan dalam kehidupan berbangsa. Sementara teokratisme (sekalipun itu teokratisme berlandaskan Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia) juga sulit diwujudkan mengingat masyarakat Indonesia sudah terlanjur terbentuk dalam suatu model yang terkotak-kotak. Dengan demikian perumusan ideologi nasional lalu didorong ke arah pencarian suatu titik temu. Dari sinilah lahir kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai “ideologi nasional” yang dimaksudkan untuk menyimpulkan semua ideologi besar dunia dalam pelaksanaannya di Indonesia.⁹¹

Kalaupun setelah kemerdekaan masih ada perdebatan ideologis, maka disini Abdurrahman Wahid menilai bahwa hal itu disebabkan karena para pengikut ideologi universal tersebut masih terkotak-kotak dalam pemahaman dalam ideologinya masing-masing. Dengan pemahaman ini, maka *indoktrinasi massif* berupa penataran P-4 yang dilaksanakan secara dramatis serta penetapan asas tunggal Pancasila bagi semua Parpol dan Ormas semestinya bisa dipandang sebagai upaya untuk sama sekali mengakhiri pemahaman ideologis yang terkotak-kotak itu.

⁹¹ Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001). Hal. 67.

Terjadinya kecenderungan ini, ungkap Abdurrahman Wahid, dinilainya telah membuat artikulasi proses ideologi itu kehilangan makna, sehingga yang berfungsi sebagai alat pelestarian persatuan dan kesatuan bangsa.

K.H. Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, memiliki pandangan yang unik dan inklusif mengenai konsep bernegara. Sebagai seorang ulama sekaligus presiden keempat Indonesia, Gus Dur menekankan pentingnya pluralisme dan toleransi dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, negara harus mampu menghargai keragaman suku, agama, dan budaya yang ada di dalamnya. Ia percaya bahwa keberagaman yaitu kekuatan, bukan kelemahan, dan oleh karena itu negara harus mengayomi dan melindungi setiap warganya tanpa diskriminasi. Dalam perspektif Gus Dur, Indonesia sebagai negara Pancasila memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip kebhinekaan ini dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gus Dur juga menekankan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia sebagai pilar utama dalam bernegara. Ia berpandangan bahwa negara yang baik yaitu negara yang menghormati hak-hak individu dan memastikan partisipasi aktif warga dalam proses politik. Gus Dur sering mengkritik pemerintahan yang otoriter dan menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas. Baginya, demokrasi tidak hanya berarti proses pemilihan yang bebas dan adil, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta

perlindungan terhadap minoritas. Dengan demikian, konsep bernegara menurut Gus Dur sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip demokrasi yang substansial.

Selain itu, Gus Dur menekankan pentingnya keadilan sosial dalam konsep bernegaranya. Ia percaya bahwa negara harus aktif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial serta memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Bagi Gus Dur, pembangunan ekonomi harus disertai dengan kebijakan yang adil dan pro-rakyat miskin. Ia berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga negara dapat menikmati kehidupan yang layak. Dengan pandangan ini, Gus Dur mendorong berbagai program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, konsep bernegara Gus Dur mencerminkan perpaduan antara pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Selain itu, Gus Dur menegaskan bahwa negara harus berfungsi sebagai pelindung bagi semua warganya, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Negara tidak boleh membiarkan adanya diskriminasi atau ketidakadilan dalam bentuk apapun. Dalam pandangannya, negara harus aktif dalam menciptakan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik yang merata bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan ini tidak hanya sebatas materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan moral, di mana setiap individu

dapat hidup dengan martabat dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.⁹²

Gus Dur juga melihat pentingnya demokrasi dalam bernegara. Demokrasi bukan hanya tentang prosedur pemilihan umum, tetapi juga tentang partisipasi aktif warga dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Ia percaya bahwa demokrasi yang sejati harus memberi ruang bagi dialog dan musyawarah untuk mencapai konsensus. Dalam hal ini, negara harus memastikan adanya kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara. Gus Dur menekankan bahwa melalui demokrasi yang inklusif dan partisipatif, negara dapat menciptakan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab, sehingga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

2. Negara Demokrasi

Kenyataan menunjukkan bahwa negara demokrasi sebagai sebuah sistem dari suatu negara selalu menjadi perhatian dunia, demokrasi merupakan pilar peradaban, tidak ada satu kelompok atau bangsa pun yang menolaknya sejauh demokrasi itu diartikan sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat secara utuh. Termasuk di Indonesia, gagasan demokrasi dan demokratisasi terus mengalir seiring berjalannya dinamika politik. Kaitannya dengan demokrasi,

⁹² M. Mashur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya, cet. I* (Yogyakarta: al-Amin, 1996), hal.115-116.

Abdurrahman Wahid banyak mengambil pendapat dari mana pun, Selama hal itu merupakan pencerminan teologi yang benar dan ketaatan yang saleh. Untuk itu menjadi wajar ketika secara terbuka ia menerima deklarasi HAM yang dirumuskan oleh PBB yang meliputi; Pertama, prinsip kedaulatan rakyat. Kedua, persamaan dibidang hukum atau undang-undang. Ketiga, kebebasan individu yang kreatif (berorganisasi dan bernegara). Keempat, segala aspek-aspek fundamental lain yang ada dalam demokrasi liberal⁹³

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, nilai Negara demokrasi itu ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat *derivasi* atau lanjutan dari yang pokok itu. Ada tiga hal nilai pokok demokrasi; kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Yang dimaksud kebebasan disini yaitu kebebasan individu dihadapan kekuasaan negara, atau hak-hak individu warga negara dan hak-hak kolektif dari masyarakat. Yang kedua keadilan merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbuka peluang bagi semua orang dan berarti juga ekonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya sesuai dengan apa yang ia ingini. Jadi masalah keadilan penting dalam arti seseorang mempunyai hak dan diberi peluang serta kemudahan untuk mencapainya. Maka keadilan akan terwujud manakala orang tidak mendapat halangan untuk mengekspresikan cita-citanya.

⁹³ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 7.

Sedangkan nilai demokrasi yang ketiga yaitu musyawarahartinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan itu lewat jalur permusyawaratan. Karena nilai- nilai pokok dalam demokrasi sedemikian itulah, maka sesungguhnya bagi Gus Dur, paham demokrasi setidaknya memiliki kesamaan yang kuat dengan misi agama. Sebab pada dasarnya agama yaitu juga menegakkan keadilan bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu, ia menolak dengan tegas apabila demokrasi diperlawankan dengan agama.¹⁸ Namun demikian Abdurrahman Wahid memberikan catatan khusus, bahwa negara demokrasi berprinsip pada kesetaran di antara seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan agama maupun keyakinan, jenis kelamin, etnik, dan lainnya. Sementara agama justru berprinsip pada perbedaan terutama atas dasar keyakinan maupun agama. Sehingga menurut Abdurrahman Wahid, apabila agama ingin memberi peran di dalam pembentukan masyarakat demokratis, maka agama sudah seharusnya melakukan transformasi ke dalam terlebih dahulu.⁹⁴

Lebih lanjut, apa yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid, lebih tertuju pada pengaplikasian nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia tidak begitu tertarik membahas soal-soal teoritis demokrasi, tetapi berkepentingan dalam upaya manifestasinya. Menurutnya, suatu Negara disebut demokratis manakala mampu menjamin hak-hak dasar manusia, yang meliputi;²⁰Pertama,

⁹⁴ 19Airlangga Pribadi dan M. Yudhie R. Haryono, *Post Islam Liberal: Membangun Dentuman, Mentradisikan Eksprimmentasi*, cet. I (Jakarta: Pasirindo, 2002), hal 267.

jaminan keselamatan fisik. Kedua, jaminan keselamatan keyakinan agama. Ketiga, jaminan kehidupan keutuhan rumah tangga. Keempat, jaminan keselamatan hak milik. Kelima, jaminan keselamatan akal. Karena itulah bagi Abdurrahman Wahid, perlu usaha yang kontinu dalam menyosialisasikan demokrasi, sebab tanpa itu demokrasi mustahil dapat berjalan. Tentang bagaimana mensosialisasikannya ia berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Amir Aziz:⁹⁵

“Ada beberapa cara guna mensosialisasikan demokrasi; Pertama, diupayakan untuk menerapkan kepada rakyat, kepada masyarakat umum tentang nilai-nilai dasar demokrasi dalam kepentingan mereka. ini merupakan pendekatan normatif. Kedua, pendekatan empirik, pendekatan yang sifatnya membangun kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dari praktek pengalaman”.

Yang pada akhirnya, pemikiran Abdurrahman Wahid juga sampai pada fakta riil dan pengalaman Indonesia dalam proses pelaksanaan demokrasi. Kiranya siapa pun mengakui, bahwa bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan sampai kini, sedang belajar berdemokrasi dan sedang mencari rumusannya yang tepat. Seraya ia mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Laode Ida:

“Di negeri kita demokrasi belum lagi tegak dengan kokoh, masih lebih berupa hiasan-hiasan luar yang bersifat kosmestis dari pada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya kalau tidak

⁹⁵ Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia*, (Jakarta: rineka. Cipta, 1999). Hal.78.

ada usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan demokrasi yang benar di negeri ini, tentu aspirasi-aspirasi itu akan terbendung oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi karenanya, dari sekarang sebenarnya telah dituntut dari kita untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang ada di negeri ini. Perjuangan itu haruslah dimulai dengan kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan-penderitaan rakyat di bawah”

Dalam kutipan Ahmad Amir Aziz, Abdurrahman Wahid berpendapat, bahawa: Pandangan ini bukanlah suatu bentuk kepesimisan, sebab di sisi lain Abdurrahman Wahid melihat, bahwa di Indonesia telah mulai muncul “*civil society*”. Komitmen Abdurrahman Wahid terhadap demokrasi muncul dari pandangannya bahwa isu demokratisasi yang muncul mengedepankan sebagai diskursus bersama dikalangan aktivis pada tahun 1990-an, dapat menjadi faktor perekat yang mempersatukan kekuatan-kekuatan bangsa yang selama ini tercerai-berai. Melalui wacana demokrasi, ia mengharapkan segenap elemen kekuatan bangsa dapat berproses bersama menuju kedewasan, dan integrasi sebagai bangsa. Sebagaimana dikutip Al-Zastraw beliau berpendapat, Jika Islam dapat memperjuangkan demokrasi, maka akan dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa⁹⁶. Baginya, demokratisasi merupakan tumpuan harapan bagi mereka yang menolak penggunaan

⁹⁶ Al-Zastrouw. *Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan?* (Jakarta: Erlangga, 1999) hal. 89.

negara untuk kepentingan agama, sekaligus memberikan tempat untuk agama. Kalau suatu masyarakat hidup dalam iklim demokratis, Islam akan terjamin. Ini merupakan *appeal* kepada orang-orang yang fanatik, yang *gandrung* pada simbol-simbol Islam. Kemudian kita bisa mengatakan, demokrasi justru akan menampilkan wajah Islam secara damai, yang tahunya cuma seram-seram saja, mereka akan merasa tentram jika demokrasi dikembangkan. Sebab mereka merasa dapat perlindungan dalam Islam.

Kemudian Abdurrahman Wahid memahami bahwa demokrasi tidak hanya sekedar dalam kerangka konstitusional saja, karena menurutnya proses demokrasi kelembagaan tidaklah cukup memenuhi bagi terciptanya masyarakat yang demokratis. Demokrasi sudah semestinya merupakan bagaian dari suatu wacana untuk melakukan proses tranformasi sosial guna melakukan pemberdayaan di kalangan masyarakat. Strategi untuk mewujudkan demokrasi sebagai bagian dari proses tranformasi sosial ini dapat dilakukan dengan membangun lembaga-lembga di wilayah masyarakat yang bersifat otonom dan mandiri dari intervensi negara.

Penerimaan Abdurrahman Wahid terhadap konsep demokrasi bukanlah tanpa alasan yang mendasar, menurutnya demokrasi di samping bisa menjamin kehidupan yang lebih baik juga menjadi jembatan bagi pluralisme keagamaan, budaya, suku, ras, dan etnik manusia yang telanjur pluralis. Di samping karena adanya kesesuaian anantara nilai

Islam dan demokrasi. Hal ini didasarkan pada asumsi, bahwa sesungguhnya Islam yaitu demokrasi. Ada beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi. Pertama, Islam yaitu agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, dari pemegang jabatan tertinggi hingga rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (syura), “*waamruhum syura bainahum*”, artinya perkara-perkara mereka dibicarakan di antara mereka, dengan demikian tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka yang pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Hal ini sebenarnya yaitu prinsip demokrasi, karena bagi Abdurrahman Wahid demokrasi pada dasarnya yaitu upaya bersamabersama untuk memperbaiki kehidupan. Karena itulah, Islam dikatakan sebagai agama perbaikan “*din al- islah*” atau agama inovasi.⁹⁷

Lebih lanjut, Abdurrahman Wahid merunut kompatibilitas Islam dan demokrasi lebih menggunakan pandangan fiqh. Baginya, pemikiran fiqh yang dirumuskan melalui *ushul al-fiqh* dan *al-qawaid al-fiqhiyyah*²⁸ bukan saja akan melahirkan pemikiran yang inklusif dan liberal serta mengakar, tetapi juga bisa merumuskan hal-hal baru sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan aktual manusia. Fiqh telah menyediakan sejumlah teori dan kaidah untuk menjadi pedoman bagi setiap intelektual

⁹⁷ Abdurrahman Wahid. *Islam, Negara dan Demokrasi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 87-88.

dalam merumuskan gagasan-gagasannya. Abdurrahman Wahid dalam konteks ini misalnya mengajukan teori *maqasid asy-syari'ah* sebagai salah satu titik temu untuk membela atau merumuskan sistem demokrasi. Antara lain; Jaminan akan keselamatan fisik seseorang, jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama, jaminan dasar yang menyangkut jaminandasar keutuhan rumah tangga, jaminan dasar terhadap keselamatan hak milik, dan jaminan dasar terhadap keselamatan akal.²⁹ Menurut Abdurrahman Wahid, teori ini bukan hanya sesuai dengan sistem demokrasi yang di dalamnya ada kedaulatan hukum, tetapi teori ini juga sesuai dengan sistem negara demokrasi, karena jaminan hak-hak dasar manusia jauh lebih baik di dalam sistem negara ini dari pada sistem yang lain.

Oleh karenanya Abdurrahman Wahid menyadari, bahwa Syari'ah sebagai etika social telah memilih demokrasi sebagai sistem yang paling rasional yang memungkinkan terjadinya pluralisme masyarakat bangsa.

Dalam konteks ini, demokrasi dan syari'ah dirumuskan dalam fungsi timbal balik. Syari'ah sebagai etika sosial dengan sendirinya bisa berfungsi sebagai etika politik dalam sebuah negara demokrasi.

B. Paradigma Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam menata hubungan baik antara agama dengan negara pada masyarakat yang majemuk di Indonesia

Gus Dur, atau Dr. (HC). KH. Abdurrahman Wahid, dikenal sebagai sosok yang secara konsisten membela hak-hak kaum minoritas dan mendorong kemajemukan di Indonesia. Sebagai Presiden ke-4, ia sering disebut sebagai Bapak Pluralisme Indonesia karena tekun mempromosikan toleransi dan menyatakan bahwa Indonesia yaitu milik semua orang, tanpa memandang ras, suku, bahasa, etnis, atau agama. Gus Dur memandang pluralisme sebagai penghargaan terhadap keberagaman yang merupakan bagian dari ketentuan Ilahi. Namun, konsep pluralisme versinya memiliki perbedaan dengan definisi umumnya. Gus Dur menekankan bahwa setiap agama memiliki kebenaran masing-masing, bukan menyamakan kebenaran di antara agama-agama tersebut.⁹⁸

Bagi Gus Dur, pluralisme bukanlah tentang menyeragamkan agama-agama, melainkan tentang menyadari keberagaman individu dalam kepercayaan mereka. Ini juga mengajarkan kesadaran akan keberagaman agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dia juga menegaskan pentingnya membela kelompok minoritas bukan hanya karena perbedaan mereka, tetapi juga demi keadilan.

Pemikiran Gus Dur tentang pluralisme tercermin dalam pengamalan Pancasila, khususnya Sila Ketiga dan Kelima, yang menekankan keberagaman dan keadilan sosial. Namun, pemahaman Gus Dur tentang pluralisme sering kali tidak dipahami oleh cendekiawan Muslim Indonesia, sehingga tindakannya

⁹⁸ Anindya Aryu Inayati, (2022) *Abdurrahman Wahid, Pluralitas dan Pluralisme Agama*, Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan, hal. 3.

dalam membela minoritas bisa disalahartikan sebagai kontroversial dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Secara kemanusiaan, Gus Dur mendukung kemerdekaan individu untuk menentukan pendapat dan keyakinan mereka sambil menghormati perbedaan dan kemajemukan Indonesia. Dia yaitu seorang humanis dan demokratis yang yakin bahwa Islam yang sejati yaitu yang damai dan membawa berkah bagi semua. Dalam bidang politik, dia meyakini bahwa rahmat Islam harus dirasakan oleh semua pihak.

Konsep pluralisme Gus Dur memiliki tiga dimensi: pemikiran, perilaku, dan tindakan. Dia menolak homogenisasi pemahaman agama dan aktif terlibat dalam kegiatan pro-demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam tindakannya sebagai Presiden, dia mencabut instruksi yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, membuka jalan bagi mereka untuk merayakan tahun baru Imlek. Dia juga aktif dalam dialog antar agama, menunjukkan toleransi dan penghargaan terhadap pluralitas.

Meskipun menghadapi kritik dari berbagai pihak, terutama kelompok Muslim konservatif, Gus Dur tetap konsisten dengan pemikiran dan tindakannya. Bagi Gus Dur, Islam yaitu pendorong pluralisme dan harus bersifat toleran, egaliter, dan demokratis untuk menyatu dengan nilai-nilai nasionalisme. Konsep pluralisme Gus Dur mencerminkan perpaduan antara Islam, keindonesiaan, dan kemanusiaan, menunjukkan kedalaman pemahaman dan keilmuannya sebagai seorang pemimpin.

Gus Dur yang terkesan memiliki sudut pandang berbeda dari setiap golongan masyarakat terkait dirinya yang penuh kontroversi. Keadaan tersebut, tidak bisa lepas dari pemikirannya yang kontroversial serta perilakunya dianggap nylenehi. Sebagai tokoh bangsa dan seorang intelektual bangsa Gus Dur dahulu yaitu seorang yang aktif menuangkan pemikirannya dalam sebuah karya tulis berupa esai dan artikel. Karya-karyanya dimuat oleh beberapa media cetak seperti majalah tempo, prisma, dan kompas, yang mana pada masa sekarang sulit di temui. Namun terdapat kumpulan mengenai karya-karya beliau yang telah di bukukan oleh salah satu penerbit yang mendukung pemikiran-pemikiran Gus Dur di media prisma dan tempo untuk dapat dafahami oleh masyarakat sekarang.

99

Dalam karya-karya Gus Dur termuat didalamnya ungkapan pemikiran beserta kritik-kritik yang kontroversial mengenai pemerintahan pada masa itu, serta pemahaman beliau tentang kehidupan beragama sebagai masyarakat pribumi dinegara yang majemuk ini. Pola pemikiran yang sering dianggap sebagian orang sangat demokrat dan sekuler. Ungkapan-ungkapan pemikiran dan kritik, beliau tulis dengan penuh kepercayaan diri dan kelantangan, namun sukar di bantah. Pemikiran kritis beliau yang kontroversi tidak hanya dipersembahkan dalam karya tulis saja, namun juga terlihat dalam tindakan perilakunya yang dianggap gegabah, bahkan nylenehi dan dianggap inkonsisten.

100

⁹⁹ Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama Dari Negara: Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ali abd ar-Raziq*, (Bantul, Pondok Edukasi, 2003) hal. 60.

¹⁰⁰ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, LKIS Yogyakarta (Cet :1 November 1999), hal. 21-23.

Berikut pemikiran Gus Dur yang relevan dengan perilakunya sebagai tokoh bangsa:

1. Hubungan Agama dan Negara.

Pemikiran Gus Dur yang disampaikan melalui berbagai media cetak berkaitan erat dengan hubungan antara agama dan negara. Sebagai tokoh bangsa serta ulama dan kyai yang sangat dihormati, Gus Dur menunjukkan kecintaan dan pemahaman mendalam terhadap agamanya. Hal ini terlihat dari perilaku dan gaya busananya yang mencerminkan seorang sosok religius. Meskipun demikian, Gus Dur juga yaitu pemimpin di negara yang majemuk ini. Ia mengakui adanya hubungan yang kuat antara agama dan pembentukan negara. Menurutnya, relasi antara agama dan negara harus dilihat dari sudut pandang fungsional, yaitu sebagai sebuah kerangka yang memiliki tujuan dan fungsi sosial dalam masyarakat. Hubungan antara keduanya sangat kuat dan saling melengkapi. Dalam menjalankan hubungan ini, Gus Dur menerapkan pola keseimbangan dengan menekankan prinsip keharmonisan. Keharmonisan ini dapat tercipta dalam masyarakat jika budaya, kepribadian, dan sistem sosialnya sesuai baik secara normatif maupun struktural.¹⁰¹

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, negara ini tidak harus menjadi negara Islam. Gus Dur mengembangkan kerangka Islam kosmopolitan dalam hubungannya dengan agama dan negara sebagai lanjutan dari pemahaman dan

¹⁰¹ Mahar tri pamungkas, Hermau Joe bagio, Siful Bachri, Abdurrahman Wahid: *Study pemikiran tentang relasi agama dan negara*, (Jurnal Candi Vol. 14, No.2 Oktober 2016). Hal. 34.

pembaruan agama. Menurutnya, Islam seharusnya menjadi faktor komplementer sebagai komponen bangsa. Dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa, Islam hadir sebagai agama rahmatan lilalamin yang menjunjung tinggi nilai perdamaian dan kemakmuran bagi umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesadaran untuk saling menghargai dan bertindak adil terhadap seluruh penduduk Nusantara. Pembentukan dan persatuan negara tidak hanya diperjuangkan oleh umat Islam, tetapi juga oleh non-Muslim. Hubungan antara agama dan negara bersifat simbiotik, sesuai dengan dasar negara yaitu UUD 1945 dan Pancasila, yang dirancang oleh para pendahulu dengan pertimbangan matang untuk mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa. Negara bertujuan untuk mengayomi dan menyatukan masyarakat, sedangkan agama berfungsi sebagai pegangan hidup dalam berperilaku dan bernegara.

Ajaran agama baik yang mendalam dan fundamental merupakan doktrin ajaran-ajaran praktis, untuk mampu membentuk tingkah laku manusia yang sesuai dengan sistem norma di masyarakat. Dengan ajaran agama pula, dapat di tanamkan nilai-nilai sosial, dan apa bila nilai itu meresap dalam pikiran sebagian besar masyarakat maka agama akan membentuk *cultural value system* atau *value orientation* itu. Dengan *Cultural value system* berarti tidak membedakannya dengan agama itu sendiri. Kadaan negara dengan masyarakat yang masih primitif kebudayaan yang ada, menjadikan agama harus mampu menyeimbangkan

diri dengan budaya yang ada. Tujuan nya agar nilai-nilai agama dapat diterima dan diterapkan secara perlahan dalam diri masyarakat bernegara.¹⁰² Jadi agama dan negara sulit terpisahkan, karena negara tanpa agama akan memunculkan kebebasan moral yang tidak ada batasanya

Dalam menjalankan sistem pemerintahan di negara yang beragam, penting untuk melibatkan rakyat dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang paling sesuai untuk Indonesia yaitu demokrasi. Sistem demokrasi dianggap tepat karena mekanismenya melibatkan partisipasi masyarakat, yang dipercaya dapat membawa dampak positif terkait keadilan bersama. Menurut Gus Dur, demokrasi sebagai sistem pemerintahan harus menjunjung tiga nilai utama: kebebasan, keadilan, dan musyawarah, yang diberikan sebagai hak individu dalam kehidupan bernegara¹⁰³. Gus Dur mengaitkan nilai-nilai utama demokrasi dengan misi agama, yaitu menegakkan keadilan demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi harus selaras dengan ajaran agama dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Gus Dur menolak demokrasi yang bertentangan dengan ajaran agama. Hubungan antara Islam dan demokrasi pada dasarnya sangat mendasar, karena Islam yaitu agama yang mengatur ibadah dan akhlak manusia, sedangkan demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang dipercaya membawa

¹⁰² Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, LKIS Yogyakarta, hal: 91.

¹⁰³ Muh. Hamid, *Jejak Sang Guru Bangsa*, (Yogyakarta Galang Pustaka, Cet.I , tahun 2014) hal. 58.

dampak positif dengan menempatkan keputusan di tangan rakyat dan menjadikan agama sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan¹⁰⁴.

Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, yaitu tokoh penting dalam diskusi mengenai hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Paradigma yang diusulkan Gus Dur menekankan pada pentingnya pemisahan namun tetap saling menghormati antara kedua entitas ini. Menurut Gus Dur, negara seharusnya bersikap netral dalam hal agama, tidak memihak atau mendiskriminasi salah satu agama. Namun, negara juga harus melindungi kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dan toleransi di tengah keberagaman agama di Indonesia.

Gus Dur juga menekankan bahwa agama seharusnya tidak menjadi alat politik atau digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Baginya, agama yaitu ruang spiritual yang mendalam dan pribadi, yang tidak seharusnya dirusak oleh kepentingan politik praktis. Dengan menjaga agama tetap di luar ranah politik, Gus Dur percaya bahwa agama bisa berfungsi sebagai sumber etika dan moral yang kuat, memberikan panduan bagi perilaku individu dan masyarakat tanpa harus terjebak dalam konflik kekuasaan.

Selain itu, Gus Dur memandang bahwa dialog antaragama yaitu kunci untuk membangun hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Ia mendorong dialog yang inklusif dan berkelanjutan antara

¹⁰⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara, dan Demokrasi Himpunan percikan Perenungan Gus Dur*, (Jakarta Erlangga, 1999). Hal. 64.

berbagai kelompok agama untuk mengatasi perbedaan dan memperkuat kesatuan nasional. Gus Dur percaya bahwa dengan saling memahami dan menghargai perbedaan, baik agama maupun negara dapat bekerja sama dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Pendekatan ini mencerminkan pandangan Gus Dur tentang pluralisme dan keadilan sosial, yang menjadi inti dari filosofi kepemimpinannya.

2. Humanisme.

Humanisme yaitu sebuah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Humanisme banyak di usung sebagai jalan ampuh untuk mewujudkan perdamaian di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Gus Dur sebagai tokoh bangsa negara majemuk ini, tidak lepas dari aliran pemikirannya tentang humanisme. Beliau mengedapankan asas kemanusiaan dalam segala aspek baik sebagai seorang muslim, dan warga negara. Dalam pandangan Gus Dur, humanisme dapat dilaksanakan dengan pluralisme dalam bertindak dan berfikir, sebab hal ini yang akan melahirkan bentuk toleransi. Sikap toleransi memang tidak bergantung pada apapun. Tetapi pengakuan akan pluralitas merupakan persoalan hati dan perilaku yang terdapat tujuan untuk menegakkan toleransi. Menurutnya sebagai umat islam tidak harus takut dengan kondisi plural yang ada di tengah

masyarakat, sebagai umat islam harus merespon positif dengan kondisi plural tersebut, dengan syarat tidak melanggar syariat agama.¹⁰⁵

Pemikiran Gus Dur tentang humanisme dapat difahami sebagai wacana pemikiran yang digunakan untuk memberi apresiasi secara luas terhadap pemberian kebaikan, yang di tujukan kepada sesama manusia yang diungkapkan dengan memberi perhatian dan kesejahteraan. Pandangan humanisme ini tidak bertolak dari nilai universal Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap kehidupan sosial manusia. Pada dasarnya Gus Dur menggunakan konsep humanisme religus yang berdasarkan pada universal Islam, akan tetapi dalam aktualisasinya bukan hanya menyentuh dalam bidang keagamaan saja. Namun humanisme religius mencakup seluruhnya, yang mampu menyentuh dalam bidang lainya dengan keterkaitan problem kemanusiaan seperti ekonomi, pendidikan dan politik.¹⁰⁶

Bagi Gus Dur dengan problem kemanusiaan yang terkonsep pada humanisme, seharusnya ada kontribusi peran agama di dalamnya untuk menuntaskan problem-problem tersebut. Bukan seharusnya dari golongan beragama ikut memunculkan konflik seperti intoleransi, diskriminasi golongan tertentu, dan pengrusakan tempat ibadah secara ilegal. Keadaan tersebut sering kali menyumbangkan munculnya masalah kemanusiaan, karena merasa lebih baik dan kurang menghargai keputusan orang lain.

¹⁰⁵ Greg Barton, *Gagasan Islam liberal Indonesia: Pemikiran Neo Modernisme Nurcholis Madjid*, Djohan Effendi, Ahmad Wahid dan Abdurrahman Wahid, Paramadina Pustaka Antara, hal :64.

¹⁰⁶ Ibid. hal. 66.

Selain problem kemanusiaan di lingkup menghargai sesama hak, problem kemanusiaan lain juga sering terjadi pada lingkup strata sosial dimasyarakat. Terutama pada strata bawah yang mengalami kelaparan, eksploitasi alam tempat tinggalnya, kemiskinan dan lain sebagainya. Dari sinilah seharusnya humanisme religius berperan penting untuk menebarkan keadilan antara sesama. karena problem kemanusiaan seperti apapun bentuknya merupakan pemicu munculnya konflik perpecahan di lingkup sosial¹⁰⁷. Bagi Gus Dur masalah mengenai kemanusiaan harus di hindari agar menumbuhkan kehidupan yang lebih damai. Terdapat delapan nilai kemanusiaan atau humanisme Gus Dur dalam pemikiran dan direalisasikan dalam perilakunya, yang dirumuskan oleh komunitas Gus durian diantaranya sebagai berikut:

- a. Ketauhidan, tauhid yaitu pengakuan manusia terhadap kepercayaan bahwa tidak ada peran dan posisi tertinggi kecuali Tuhan. Prinsip inilah yang dijadikan Gus Dur sebagai sebuah acuan bagi manusia untuk tidak berhak menentukan baik dan buruk, benar dan salah karena semua itu merupakan hak prerogatif Tuhan. Tauhid yang di fahami Gus Dur bukan hanya sekedar terpaku pada ranah tunggal saja sebagai satu-satunya zat yang maha kuasa. Tetapi konsep tauhid juga meliputi implementasi sifat-sifat tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya pengasih dan penyayang terhadap sesama. Maka sudah seharusnya sifat dan perilaku yang tertanam harus menyadari diri

¹⁰⁷ Muhammad Aqil, *Nilai-nilai humanisme dalam dialog antar agama prespektif Gus Dur*, jurnal of religius studies Al Adyan, Vol.1 No.1, Juni 2020. hal :59.

sebagai makhluk Tuhan dengan tidak menumbuhkan sikap fanatisme terhadap suatu golongan.¹⁰⁸

- b. Kemanusiaan, merupakan sebuah tindakan penghormatan dan penghargaan dengan menyadari diri sebagai makhluk Tuhan, yang dipercaya untuk memelihara dan memakmurkan bumi. Oleh sebab itu kamakmuran didapat dari sikap dan perilaku saling menghormati, tolong menolong sesama makhluk Tuhan. Dengan tidak merendahkan dan mendiskriminasikan salah satu golongan. Gus Dur sebagai tokoh bangsa dikenal sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, seperti beliau menuntaskan masalah konflik Poso, Aceh dan Papua. Ketika Gus Dur berada di puncak politik beliau mendapat konflik di lengserkan dengan dugaan kasus yang menjerat dirinya namun tak kunjung menemukan kesalahan pada beliau. Sehingga membuat para murid Gus Dur tidak terima dan ingin membelanya, namun beliau memilih tidak membesarkan perkara dan memilih jalan damai dan pasrah akan fitnah yang di tujukan pada beliau. Karena menurutnya perdamaian di tengah kerumunan manusia lebih penting di banding kekuasaan.¹⁰⁹
- c. Keadilan, merupakan keseimbangan. Bagi Gus Dur keadilan sangat wajib diperjuangkan, beliau mencerminkan nilai keadilan tanpa membedakan kelompok yang memang memiliki hak sama. Gus Dur memperlakukan dengan baik kelompok minoritas sama halnya

¹⁰⁸ Muhammad Aqil, *Nilai-nilai humanisme dalam dialog antar agama prespektif Gus Dur*, Jurnal Adyan Vol.1 No.1, 2020, hal 60.

¹⁰⁹ Ibid. hlm.62

dengan mayoritas. Misalnya Gus Dur membela hak kelompok Ahmadiyah karena kehilangan kerja dan status sosialnya.

- d. Kesetaraan, yaitu dengan tidak memandang yang lebih rendah dan lebih tinggi. Gus Dur memandang kesetaraan dengan keadaan keberagaman di Indonesia, dimana ada yang mendominasi atau mayoritas dan ada yang minoritas. Disini Gus Dur menempatkannya sama dengan memberi kekuatan untuk membela hak-hak mereka dan patut dihormati.
- e. Kebebasan, bebas di sini menekankan pada hak-hak setiap kelompok atau golongan untuk bisa melakukan peribadatnya sesuai kepercayaan tanpa mengganggu yang lainnya. Setiap umat berhak mendapat kesempatan untuk berpendidikan, hak berpolitik dan kesehatan. Gus Dur memandang bahwa bukan siapa yang mayoritas dan minoritas, namun semua dianggap mayoritas di sisi kemanusiaan.
- f. Persaudaraan, Gus Dur memahami bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk, dengan beragam perbedaan yang ada. Ditengah perbedaan ini Gus Dur memahami pentingnya nilai persaudaraan antara sesama sebagai dasar kemanusiaan dan bhineka tunggal ika sebagai bentuk saling memahami dan saling percaya.
- g. Kesatria, merupakan keberanian untuk mewujudkan nilai-nilai yang ingin diraih dengan proses perjuangan yang penuh tanggung jawab. Gus Dur seringkali menunjukkan sikap ksatriannya dalam mewujudkan cita-cita dan harapannya dengan gigih untuk

memanusiakan manusia. Walau kontroversi dan perlawanan terhadap beliau gentar dilakukan. Namun kebenaran akhirnya memihak kepada beliau bahwa membela kemanusiaan yaitu kunci kemakmuran di bumi yang patut di junjung tinggi.

- h. Kearifan lokal, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam budaya dan tradisi yang telah melekat pada masyarakatnya. Gus Dur menjadikan kearifan lokal sebagai sumber gagasan untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan. Kearifan lokal mampu dijadikan fasilitas dalam memahami tradisi dan nilai-nilai untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkontribusi membangun rasa kebersamaan dan solidaritas.¹¹⁰

Gus Dur merupakan sosok bapak bangsa yang lahir di lingkungan pesantren dari fihak ayah dan ibunya. Serta berasal dari keluarga yang dihormati dan berintelektual tinggi dan berperan di negara. Sehingga mudah bagi Gus dur untuk meneladani jejak para orang tuanya. Pemikiran Gus dur mulai dari agama dan negara yang memiliki sudut pandang fungsional antara keduanya, yang mana agama berperan sebagai komponen dalam salah satu rujukan penyelesaian masalah bangsa, harus memahami keadaan masyarakatnya yang beragam. Serta pemikiran beliau tentang humanisme terhadap semua kalangan manusia yang merupakan kunci perdamaian *universal*. Gus dur menginterpretasikan pemikiran tersebut dalam perilakunya sebagai tokoh bangsa, terbilang rasional namun tidak meninggalkan aspek-

¹¹⁰ Muhammad Aqil, *Nilai-nilai humanisme dalam dialog antar agama prespektif Gus Dur*, Jurnal Aladyan, Vol.1 No.1, 2020. Hal. 68.

aspek rohaniyah. Beliau juga di kenal sebagai pribadi yang emosional dalam merealisasikan gagasan dari pemikirannya, sehingga membuat beliau di kenal sebagai tokoh bangsa yang penuh kontroversi dan berani masuk pada radikalisme agama¹¹¹

Jadi Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara agama dan negara. Paradigma pemikiran Gus Dur menekankan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat majemuk. Sebagai seorang ulama dan mantan Presiden Indonesia, Gus Dur dikenal dengan pandangan yang inklusif dan pluralis. Ia percaya bahwa negara harus bersikap netral terhadap semua agama, dan tidak memihak pada satu agama tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang harmonis di tengah-tengah perbedaan keyakinan yang ada di Indonesia.

Salah satu prinsip utama dalam pemikiran Gus Dur yaitu penghormatan terhadap hak-hak minoritas. Gus Dur sering kali berbicara mengenai pentingnya melindungi hak-hak kelompok minoritas, baik dalam konteks agama, etnis, maupun budaya. Menurutnya, negara harus hadir sebagai penjamin keadilan bagi semua warganya tanpa diskriminasi. Ia menolak keras segala bentuk intoleransi dan diskriminasi yang dapat merusak keharmonisan sosial. Dalam pandangannya, keragaman yaitu kekayaan yang harus dirayakan dan dijaga.

¹¹¹ M. Hamid, *Jejak Sang Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014), hal. 14.

Gus Dur juga menekankan pentingnya dialog antaragama sebagai alat untuk memperkuat persatuan nasional. Ia aktif mempromosikan dialog dan kerja sama antarumat beragama sebagai upaya untuk meningkatkan saling pengertian dan mengurangi potensi konflik. Melalui dialog, Gus Dur percaya bahwa masyarakat dapat saling memahami dan menghargai perbedaan masing-masing. Ini merupakan upaya untuk membangun fondasi sosial yang kuat di atas nilai-nilai toleransi dan inklusivitas.

Dalam konteks politik, Gus Dur menganjurkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai agama yang humanis. Baginya, agama harus menjadi sumber inspirasi bagi etika politik yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Ia juga menekankan bahwa agama tidak boleh digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik praktis yang bisa merusak harmoni sosial. Gus Dur mengedepankan pentingnya moralitas dalam politik, di mana pemimpin dan pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat secara adil.

Paradigma pemikiran Abdurrahman Wahid dalam menata hubungan antara agama dan negara di masyarakat yang majemuk mencerminkan visinya tentang Indonesia yang inklusif, adil, dan damai. Gus Dur melihat peran negara sebagai fasilitator yang memastikan semua warga negara, terlepas dari latar belakang agama dan etnis, mendapatkan perlakuan yang setara. Melalui pandangannya, ia berusaha membangun Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebhinekaan, sehingga setiap individu bisa hidup berdampingan dalam kerukunan.

Sehingga Abdurrahman Wahid, ymemiliki paradigma pemikiran yang sangat inklusif dan pluralistik dalam menata hubungan antara agama dan negara di Indonesia, sebuah negara dengan masyarakat yang sangat majemuk. Pemikiran Gus Dur mengenai hubungan ini dapat dilihat melalui beberapa prinsip utama:

a. Inklusivisme dan Pluralisme

Gus Dur sangat menekankan pentingnya inklusivisme dan pluralisme dalam kehidupan beragama di Indonesia. Ia percaya bahwa semua agama memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan hormat. Menurut Gus Dur, pluralisme bukan hanya penerimaan terhadap keberagaman, tetapi juga pengakuan aktif dan penghargaan terhadap perbedaan.

2. Negara Pancasila

Gus Dur mendukung kuat konsep Negara Pancasila, yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila utama, namun dalam konteks yang inklusif dan tidak diskriminatif. Ia melihat Pancasila sebagai landasan yang dapat mempersatukan berbagai kelompok agama di Indonesia tanpa memaksakan satu agama tertentu sebagai agama negara.

3. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Sebagai seorang demokrat sejati, Gus Dur memandang demokrasi sebagai sistem terbaik untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara, termasuk dalam hal kebebasan beragama. Ia sangat menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan.

4. Dialog Antaragama

Gus Dur sering menginisiasi dan mendukung dialog antaragama sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan saling pengertian antara berbagai komunitas agama. Ia percaya bahwa dialog yaitu kunci untuk membangun toleransi dan harmoni dalam masyarakat majemuk.

5. Penolakan terhadap Radikalisme dan Ekstremisme:

Gus Dur secara konsisten menentang segala bentuk radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam kerukunan antarumat beragama. Ia percaya bahwa interpretasi agama yang sempit dan eksklusif hanya akan membawa perpecahan dan konflik.

6. Pendidikan dan Kesadaran Sosial

Gus Dur juga melihat pendidikan sebagai alat penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan. Melalui pendidikan yang inklusif, generasi muda diajarkan untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dalam harmoni.

Secara keseluruhan, paradigma pemikiran Gus Dur menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan yang inklusif. Ia percaya bahwa hanya dengan penghargaan yang tulus terhadap keberagaman dan melalui pendekatan dialogis serta inklusif, Indonesia dapat mencapai harmoni dan kemajuan sebagai bangsa yang majemuk. Pemikiran-pemikirannya ini terus menjadi inspirasi dan panduan bagi banyak pihak dalam mengelola hubungan antara agama dan negara di Indonesia.